



# IKHTISAR EKSEKUTIF



Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja (*performance results*) dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan Indikator Kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan Indikator Kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang tahun 2021 dengan jumlah keseluruhan sasaran strategi sebanyak 2 (dua) sasaran dengan kategori capaian sasaran **Baik**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Tahun 2021 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.



# KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026.

Dengan telah tersusunnya LKIP ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak baik langsung dan tidak langsung yang telah banyak membantu secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2021 hingga selesainya penyusunan LKIP ini.

Penyusunan LKIP ini, diupayakan sebaik mungkin dan tidak luput dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, namun demikian Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKIP ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang yang telah dilaksanakan pada tahun 2021.

Pandeglang, Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA,  
SANDI DAN STATISTIK  
KABUPATEN PANDEGLANG

**Ir. GIRGIJANTORO**

Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19620911 199003 1 007



# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 DASAR HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- 2.1 RENSTRA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI  
DAN STATISTIK
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021
- 2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 PENGUKURAN KINERJA
- 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA
- 3.3 KEUANGAN TAHUN 2021

BAB IV PENUTUP

- 4.1 PENGUKURAN KINERJA
- 4.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

LAMPIRAN



# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, yang dapat didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari lembaga kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan lembaga yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang selanjutnya disingkat menjadi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang yang keberadaan kelembagaannya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat dan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik.

Lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang merupakan unsur pelaksana urusan komunikasi informasi, sandi dan statistik. Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sebagai lembaga dalam pemerintahan harus tampil untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat serta dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan saran dan kritik untuk peningkatan Pembangunan di Wilayah Pandeglang. Oleh karenanya wewenang Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang akan selalu bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung dengan masyarakat tentunya didukung dengan fungsi-fungsi yang menjadi kelancaran kinerjanya. Selain fungsi yang harus dijalankan guna pencapaian kinerja dan tujuan, dukungan dari Pemerintah Daerah pun harus diberikan, baik dalam segi teknis ataupun non teknis diantaranya adalah dukungan anggaran yang dialokasikan guna menopang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2021 sebagai upaya pengendalian agar kegiatan yang dilakukan tetap terarah kepada tujuan akhir yang akan dicapai. Selain bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, laporan ini merupakan evaluasi atas perencanaan yang telah disusun sebelumnya baik dalam sisi anggaran, rencana strategi, rencana kerja dan perencanaan lainnya. Sehingga laporan ini dapat dijadikan tolok ukur atas sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan yang menjadi suatu siklus pelaksanaan kinerja yang berjenjang, simultan dan akuntabel, selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Keberadaan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang serta pelaksanaan tugas dan kinerjanya berdasarkan pada :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kierja Instansi Pemerintah;
  14. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2005-2025;
  18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 13);;
  20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026;
  21. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 3 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rangkaian Musrenbang RKPD dan tatacara Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
  22. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 53 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatikan Sandi dan Statistik.

23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2019 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 Nomor 6);
25. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1. Maksud**

Maksud dari pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini adalah bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Satuan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

#### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP adalah untuk mewujudkan Instansi Pemerintah kepada pihak-pihak yang memberikan mandat/amanat. Dengan demikian LKIP merupakan sarana bagi Instansi Pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima Instansi Pemerintah tersebut. Selain itu penyampaian LKIP kepada pihak yang berhak (secara hirarki) juga bertujuan untuk memenuhi antara lain:

- a. Pertanggungjawaban dari unit yang lebih rendah kepada unit yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. LKIP ini lebih menonjolkan manajerialnya;
- b. Pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan dalam mencapai kehematan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan misi instansi;



- c. Perbaikan dalam perencanaan, khususnya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

## **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang yang berisikan gambaran umum Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, landasan hukum pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan, maksud dan tujuan serta sistematika laporan.

### **BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**

Bab ini menjelaskan tentang rencana strategis, tujuan dan sasaran strategis, strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perencanaan kerja dan penetapan kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2021.

### **BAB III KINERJA**

Bab ini memuat uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis kinerja termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

### **BAB IV PENUTUP**

Uraian singkat tinjauan umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan serta strategi pemecah masalah yang akan dilaksanakan di tahun mendatang.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA



### 2.1 RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG

Dalam sistem Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Renstra merupakan dasar bagi penyusunan laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun, dengan memuat visi, misi dan sasaran yang akan dilaksanakan dengan strategi serta program /kegiatan pada tahun 2021.

Rencana strategis Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2021, dengan berorientasi kepada hasil ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tahun anggaran 2021 yang merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

#### 2.1.3 Strategi dan Kebijakan

##### 2.1.3.1 Strategi

Strategi merupakan cara dalam mencapai sasaran-sasaran strategi secara nyata yang menuntun pencapaian tujuan dan visi/misi dinas. Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi sebagaimana telah dirumuskan di atas serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan/kelemahan dan peluang/ancaman yang ada, maka selanjutnya dirumuskan strategi dan

kebijakan pembangunan bidang kominfosantik di kabupaten Pandeglang selama lima tahun mendatang (2021-2026), yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan keprofesionalan aparat Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik melalui peningkatan kualifikasi pendidikan dan pelatihan;
2. Memfasilitasi kelancaran komunikasi dan informatika melalui penyediaan sarana dan prasarana yang mudah dan murah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi maupun antar wilayah terkait guna menciptakan sinergitas dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
4. Melaksanakan sosialisasi produk-produk di bidang kominfosantik;
5. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kominfosantik sesuai perkembangan teknologi
6. Memperluas penyebaran komunikasi dan informasi ke setiap wilayah di Kabupaten Pandeglang
7. Membuka akses jasa pelayanan internet pemerintah daerah kepada masyarakat luas.

#### **4.3.2 Kebijakan**

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.

Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika, Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang adalah :

1. Perwujudan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang antisipatif, adaptif dengan perkembangan lingkungan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah;
2. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana serta system jaringan komunikasi dan informasi yang berkualitas kepada masyarakat
3. Meningkatkan dan mengembangkan serta membangun jejaring, dan pelayanan jasa di bidang kominfosantik

## **2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Rencana Kinerja tahun 2021 merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan lima tahunan. Pelaksanaan kinerja tahun 2021 harus sesuai dengan arah Renstra Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan kinerja tahun 2021 merupakan

rencana kerja tahun pertama sesuai dengan pembentukan OPD Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi lembaga. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang sepenuhnya dapat ditunjukkan pada rencana kinerja tahun 2021 ini.

Kebijakan yang diambil dalam melaksanakan kinerja tahun 2021 adalah:

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran
2. Peningkatan, optimalisasi dan perawatan sarana prasarana kantor
3. Melakukan peningkatan dan pengembangan SDM personil
4. Pembangunan pusat media informasi berupa Ruang Pint@r Kabupaten Pandeglang
5. Penyebaran informasi dan data kepada masyarakat serta jejaring kerja sama
6. Evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

Dari kebijakan yang telah ditetapkan di atas, maka sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dilapangan, maka ditentukanlah 5 (lima) Program dan 39 Sub Kegiatan dengan rincian tersebut di bawah ini :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
<b>A</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.530.655.336,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.000.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	21.000.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.360.000,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.959.616.336,00

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	33.000.000,00
13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	31.519.000,00
14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.985.000,00
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	32.388.000,00
16	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.187.000,00
17	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.600.000,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.000.000,00
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	30.000.000,00
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	20.000.000,00
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000,00
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	28.000.000,00
24	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	60.000.000,00
<b>B</b>	<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>533.403.000,00</b>
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	72.000.000,00
2	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	76.600.000,00
3	Pelayanan Informasi Publik	100.000.000,00
4	Layanan Hubungan Media	207.800.000,00

5	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Kumunitas	77.003.000,00
<b>C</b>	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	<b>560.000.000,00</b>
6	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
7	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90.000.000,00
8	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	200.000.000,00
9	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000,00
<b>D</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>239.828.000,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Disemniasi Data Statistik Sektoral	70.000.000,00
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	25.500.000,00
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	99.328.000,00
4	Pengembangan Infrastruktur	45.000.000,00
<b>E</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>100.000.000,00</b>
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	59.220.000,00
2	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.780.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.963.886.336,00</b>

### **2.3 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021**

Penetapan kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2021 yang mengacu pada rencana strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2021-2026. Penetapan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang untuk tahun 2021 tertera pada lampiran I

**A. RENCANA KINERJA TAHUN 2021**

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket
Uraian	Indikator	Rencana Tk. Capaian (Target)		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tk.Capaian (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terselenggaranya layanan dasar perangkat daerah	Terpenuhinya layanan dasar perangkat daerah	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a				3.530.655.336,00	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	20.000.000,00 Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun 100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	5.000.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun 100%	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	5.000.000,00 Jumlah Dokumen laporan keuangan yang tersusun 100%	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	5.000.000,00 Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun 100	
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp. %	5.000.000,00 Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD 100	
				Koordinasi dan	Masukan	Rp.	21.000.000,00	



				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran Hasil	%	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 100%	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan Keluaran	Rp.	34.360.000,00 Tersusunnya evaluasi kinerja PD	
					Hasil	%	100%	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan Keluaran	Rp.	2.959.616.336,00 Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	
					Hasil	%	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan Keluaran	Rp.	10.000.000,00 Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	
					Hasil	%	100	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Masukan Keluaran	Rp	30.000.000,00 Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Hasil	%	100	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan Keluaran	Rp	20.000.000,00 Tersedianya barang milik daerah	
					Hasil	%	100	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan Keluaran	Rp	33.000.000,00 Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	
					Hasil	%	100	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan Keluaran	Rp	31.519.000,00 Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	
					Hasil	%	100	
				Penyediaan Peralatan Rumah	Masukan Keluaran	Rp	3.985.000,00 Tersedianya peralatan rumah tangga	
					Hasil	%		

				Tangga	Hasil	%	100	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	32.388.000,00 Tersedianya bahan logistik kantor 100	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	22.187.000,00 Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 100	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	45.600.000,00 Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD 100	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	39.000.000,00 Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 100	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	30.000.000,00 Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 100	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	30.000.000,00 Tersedianya jasa pelayanan umum kantor 100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	20.000.000,00 Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 100	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan dinas	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	40.000.000,00 Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100	

				operasional atau Lapangan				
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	28.000.000,00 Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya 100	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	60.0000.000,00 Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100	
			<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>				<b>533.403.000,00</b>	
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	72.000.000,00 Jumlah Konten Informasi dan Dokumentasi yang terpublikasi 100	
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	76.600.000,00 Terselenggaranya Operasional LPPL Berkah FM 100	
				Pelayanan Informasi Publik	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	100.000.000,00 Persentase pelayanan informasi publik yang selesai dilayani 100	
				Layanan Hubungan Media	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	207.800.000,00 Jumlah kerjasama media 100	
				Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Masukan Keluaran Hasil	Rp % %	77.003.000,00 Jumlah fasilitasi pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) 100	
			<b>Program Aplikasi Informatika</b>				<b>560.000.000,00</b>	
				Pendaftaran Nama	Masukan	Rp	200.000.000,00	

				Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Keluaran Hasil	%	Ketersediaan domain pandeglangkab.go.id 100	
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	90.000.000,00 Ketersediaan fasilitas infrastruktur TIK 100	
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	200.000.000,00 Jumlah OPD yang terhubung dalam WAN 100	
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	70.000.000,00 Jumlah dokumen pengawasan e-government 100	
			<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>				<b>239.828.000,00</b>	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan,	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	70.000.000,00 Jumlah Indikator Statistik Sektoral 100	
				Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang tertinggal	Masukan Keluaran Hasil	Rp %	25.500.000,00 Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Operator Pengelola Data OPD 100	

				Membangun Metadata Statistik Sektoral	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	99.328.000,00 Jumlah Data Statistik Sektoral dalam bentuk infografis 100	
				Pengembangan Infrastruktur	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	45.000.000,00 Jumlah Pengembangan Aplikasi 100	
			<b>Program Penyelenggara an Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>				<b>100.000.000,00</b>	
				Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	59.220.000,00 Jumlah kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik 100	
				Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan Keluaran Hasil	Rp  %	40.780.000,00 Jumlah kegiatan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100	

**B. PENETAPAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA SANDI DAN STATISTIK KABUPATEN PANDEGLANG**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA	OUTCOME	ANGGARAN
			TARGET		TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Program Informasi dan Komunikasi Publik	IKM Pelayanan Publik	100%			533.403.000,00
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Informasi dan Dokumentasi yang terpublikasi	2 kegiatan	Jumlah Konten Informasi dan Dokumentasi yang terpublikasi	2 kegiatan	72.000.000,00
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional LPPL Berkah FM	12 bulan	Terselenggaranya Operasional LPPL Berkah FM	12 bulan	76.600.000,00
	Pelayanan Informasi Publik	Persentase pelayanan informasi publik yang selesai dilayani	3 kegiatan	Persentase pelayanan informasi publik yang selesai dilayani	3 kegiatan	100.000.000,00
	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media	2 Kegiatan	Jumlah kerjasama media	2 Kegiatan	207.800.000,00
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah fasilitasi pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	2 Kegiatan	Jumlah fasilitasi pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	2 Kegiatan	77.003.000,00
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan	Program Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	100%		100%	560.000.000,00

<b>Komunikasi (TIK)</b>						
	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota	Ketersediaan domain pandeglangkab.go.id	12 bulan	Ketersediaan domain pandeglangkab.go.id	12 bulan	200.000.000,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan fasilitas infrastruktur TIK	12 bulan	Ketersediaan fasilitas infrastruktur TIK	12 bulan	90.000.000,00
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung dalam WAN	12 bulan	Jumlah OPD yang terhubung dalam WAN	12 bulan	200.000.000,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan e-government	12 bulan	Jumlah dokumen pengawasan e-government	12 bulan	70.000.000,00
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>persentase statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>persentase statistik sektoral</b>	<b>100%</b>	<b>239.828.000,00</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Indikator Statistik Sektoral	10 Dokumen	Jumlah Indikator Statistik Sektoral	10 Dokumen	70.000.000,00

	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang tersusun	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Operator Pengelola Data OPD	2 Kegiatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Operator Pengelola Data OPD	2 Kegiatan	25.500.000,00
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral dalam bentuk infografis	3 Kegiatan	Jumlah Data Statistik Sektoral dalam bentuk infografis	3 Kegiatan	99.328.000,00
	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengembangan Aplikasi	1 Kegiatan	Jumlah Pengembangan Aplikasi	1 Kegiatan	45.000.000,00
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)</b>	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi</b>	<b>Persentase Pengaman Informasi daerah</b>		<b>Persentase Pengaman Informasi daerah</b>		<b>100.000.000,00</b>
	Pelaksanaan keamanan informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	12 Bulan	Jumlah kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non elektronik	12 Bulan	59.220.000,00
	Operasionalisasi jarring komunikasi sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	Jumlah kegiatan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	40.780.000,00



Secara umum kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2021 dapat dikatakan berhasil dicapai, akan tetapi dalam perjalanan pelaksanaannya terdapat hambatan yang bersifat teknis atau non teknis. Hambatan tersebut ditemukan dalam internal ataupun eksternal kantor yang tidak dapat diprediksikan, seperti adanya perubahan anggaran pemerintah daerah, rotasi/mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, faktor waktu dan perubahan harga barang yang fluktuatif. Oleh karenanya target kinerja yang ditetapkan tidak 100% tercapai.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Penyampaian kinerja merupakan perwujudan dari capaian kinerja secara menyeluruh dari Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang kinerja yang dicapai merupakan hasil kontribusi dari seluruh jajaran serta hasil dari implementasi program dan kegiatan selama tahun 2021. Penyajian Indikator ini dapat dijadikan masukan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan, sekaligus sebagai bahan pertimbangan apakah kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan Renstra Kabupaten Pandeglang tahun 2021-2026, Sedangkan uraian pencapaian sasaran strategis merupakan hasil akhir pelaksanaan program dan kegiatan unit kerja guna mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan.

### 3.1 PENGUKURAN KINERJA

Untuk mengukur capaian kinerja sasaran tahun tersebut digunakan metodologi pengukuran pencapaian kinerja sesuai dengan *assessment*). Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2021 membandingkan antara target pencapaian Indikator Kinerja realisasinya, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran kardinal sebagai berikut :

Klasifikasi nilai	Prediksi
Lebih dari 90%	: Sangat baik
Lebih dari 80% - 90	: Baik
Lebih dari 70% - 80	: Sedang
Lebih dari 60% - 70	: Kurang Baik
Kurang dari 60%	: Buruk

Oleh karenanya perhitungan dalam analisis kinerja yang dilaksanakan pada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang atas kinerja dan keuangan didasarkan pada perhitungan tersebut di atas.

### 3.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih dititikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stakeholder lainnya, dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh Indikator Kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>IKM OPD</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	11 Dok	11 Dok	100
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
3	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Laporan	1 Dok	1 Dok	100

	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keuangan yang tersusun			
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	1 Dok	100
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Dok	3 Dok	100
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya evaluasi kinerja PD	3 Dok	3 Dok	100
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	12 bulan	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	1 Dok	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5 Dok	5 Dok	100
11	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya barang milik daerah	7 Jenis	7 Jenis	100
12	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	58 Stel	58 Stel	100
13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-
14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100
15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	100
16	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	100
17	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	100
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	100
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	100
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	100
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	100
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 unit	6 unit	100
23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	7 jenis	7 jenis	100

	Operasional atau Lapangan	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	8 jenis	8 jenis	100
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 unit	1 unit	100
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>		<b>IKM Pelayanan Pu blik</b>			
1	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi publik	Jumlah Konten Informasi dan Dokumentasi yang terpublikasi	2 Keg	2 Keg	100
2	Pelayanan Informasi Publik	Persentase pelayanan informasi publik yang selesai dilayani	3 Keg	3 Keg	100
3	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah fasilitasi pembentukan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	2 Keg	2 Keg	100
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terselenggaranya Operasional LPPL Berkah FM	12 bulan	12 bulan	100
5	Layanan Hubungan Media	Jumlah kerjasama media	2 Keg	2 Keg	100
<b>Program Aplikasi Informatika</b>		<b>Indeks SPBE</b>			
1	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten	Ketersediaan domain pandeglangkab.go.id	12 bulan	12 bulan	100
2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Ketersediaan fasilitas infrastruktur TIK	12 bulan	12 bulan	100
3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang terhubung dalam WAN	12 bulan	12 bulan	100
4	Penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi	Jumlah dokumen pengawasan e-government	12 bulan	12 bulan	100
<b>Pogram Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>		<b>persentase statistik sektoral</b>			
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Indikator Statistik Sektoral	10 Dok	10 Dok	100
2	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Operator Pengelola Data OPD	2 Keg	2 Keg	100
3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral dalam bentuk infografis	3 Keg	3 Keg	100
4	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Pengembangan Aplikasi	1 Keg	1 Keg	100
<b>Pogram Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>		<b>Persentase Pengaman Informasi daerah</b>			
1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis	Jumlah kegiatan pengamanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik dan non	12 bulan	12 bulan	100

	Elektronik dan Non Elektronik	elektronik			
2	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 bulan	12 bulan	100

### 3.3 KEUANGAN TAHUN 2021

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, memiliki anggaran sebesar Rp. **4.975.592.456,00** setelah perubahan memiliki anggaran Rp. **4.963.886.336,00** yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan rincian :

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	3.115.841.456,00	2.959.616.336,00
KEGIATAN NON GAJI	1.859.751.000,00	2.004.270.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>4.975.592.456,00</b>	<b>4.963.886.336,00</b>

Dalam keuangan yang akan disajikan Realisasi APBD yang berada pada Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2021 dihitung berdasarkan Anggaran yang telah dilakukan perubahan, yaitu sebesar Rp. **2.004.270.000,00** dari pagu anggaran perubahan Rp. **4.963.886.336,00** atau capaian sebesar **90,50** %. Capaian tersebut tidak merupakan nilai yang sangat memuaskan karena menurut sistem penilain sendiri (*self assesment*) sebagaimana telah dijelaskan di atas, nilai tersebut masuk dalam predikat **Baik**.

Adapun rincian anggaran realisasi per-kegiatan dan keuangan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN	%
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.963.886.336,00</b>	<b>4.492.170.888,00</b>	<b>471.715.448,00</b>	<b>90.50</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.530.655.336,00</b>	<b>3.146.241.888,00</b>	<b>384.413.448,00</b>	<b>89.11</b>
<b>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>6.935.000,00</b>	<b>13.065.000,00</b>	<b>34.68</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	1.775.000,00	210.000,00	1.565.000,00	11.83
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.500.000,00	-	6.500.000,00	-
Honorarium Narasumber atau pembahas, Moderator, pembawa acara dan panitia	3.375.000,00	3.375.000,00	-	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	8.350.000,00	3.350.000,00	5.000.000,00	40.12
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.165.000,00</b>	<b>1.835.000,00</b>	<b>63.30</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	1.425.000,00	115.000,00	1.310.000,00	8.07
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.625.000,00	1.100.000,00	525.000,00	67.69
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.950.000,00	-	100
<b>Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>41.20</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	1.880.000,00	260.000,00	1.620.000,00	13.83
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00	-	1.170.000,00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.800.000,00	150.000,00	92.31
<b>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.530.000,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>50.60</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	1.880.000,00	230.000,00	1.650.000,00	12.23
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00	550.000,00	620.000,00	47.01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	1.950.000,00	1.750.000,00	200.000,00	89.74
<b>Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>2.490.000,00</b>	<b>50.20</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	1.880.000,00	260.000,00	1.620.000,00	13.83
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.170.000,00	550.000,00	620.000,00	47.01
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim	1.950.000,00	1.700.000,00	250.000,00	87.18

Pelaksana Kegiatan				
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>5.575.000,00</b>	<b>15.425.000,00</b>	<b>26.55</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	13.100.000,00	650.000,00	12.450.000,00	4.96
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	7.900.000,00	4.925.000,00	2.975.000,00	62.34
<b>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>34.360.000,00</b>	<b>18.225.000,00</b>	<b>16.135.000,00</b>	<b>53.04</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	12.410.000,00	2.000.000,00	10.410.000,00	16.12
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.250.000,00	1.100.000,00	2.150.000,00	33.85
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	18.700.000,00	15.125.000,00	3.575.000,00	80.88
<b>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>2.959.616.336,00</b>	<b>2.780.815.893,00</b>	<b>178.800.443,00</b>	<b>93.96</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	1.148.733.070,00	1.113.032.940,00	35.700.130,00	96.89
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	131.130.446,00	127.123.860,00	4.006.586,00	96.94
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	155.905.650,00	149.570.000,00	6.335.650,00	95.94
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.758.200,00	23.460.000,00	298.200,00	98.74
Belanja Tunjangan Beras PNS	81.370.388,00	78.213.600,00	3.156.788,00	96.12
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.112.869,00	2.003.899,00	108.970,00	94.84
Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.039,00	15.769,00	270,00	98.32
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.326.289,00	2.242.752,00	83.537,00	96.41
Belanja luran Jaminan Kematian PNS	6.978.936,00	6.728.323,00	250.613,00	96.41
Belanja luran Simpanan peserta tabungan Perumahan Rakyat PNS	5.772.000,00	-	5.772.000,00	-
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.401.512.449,00	1.278.424.750,00	123.087.699,00	91.22
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>6.150.000,00</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>61.50</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	7.050.000,00	3.500.000,00	3.550.000,00	49.65
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.650.000,00	300.000,00	89.83
<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>29.060.000,00</b>	<b>940.000,00</b>	<b>96.87</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	3.400.000,00	2.460.000,00	940.000,00	72.35



Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	26.600.000,00	26.600.000,00	-	100
<b>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>16.540.000,00</b>	<b>3.460.000,00</b>	<b>82.70</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	5.000.000,00	1.540.000,00	3.460.000,00	30.80
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
<b>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>60.00</b>
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	19.000.000,00	11.400.000,00	7.600.000,00	60.00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	14.000.000,00	8.400.000,00	5.600.000,00	60.00
<b>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>31.519.000,00</b>	<b>27.959.000,00</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>88.71</b>
Belanja Modal Komputer unit lainnya	17.000.000,00	17.000.000,00	-	100
Belanja Modal peralatan Personal Komputer	14.519.000,00	10.959.000,00	3.560.000,00	75.48
<b>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>	<b>3.985.000,00</b>	<b>2.060.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>51.69</b>
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	3.985.000,00	2.060.000,00	1.925.000,00	51.69
<b>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</b>	<b>32.388.000,00</b>	<b>17.874.000,00</b>	<b>14.514.000,00</b>	<b>55.19</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	32.388.000,00	17.874.000,00	14.514.000,00	55.19
<b>Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</b>	<b>22.187.000,00</b>	<b>5.960.000,00</b>	<b>16.227.000,00</b>	<b>26.86</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	22.187.000,00	5.960.000,00	16.227.000,00	26.86
<b>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>	<b>45.600.000,00</b>	<b>21.780.000,00</b>	<b>23.820.000,00</b>	<b>47.76</b>
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	45.600.000,00	21.780.000,00	23.820.000,00	47.76
<b>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>	<b>39.000.000,00</b>	<b>12.322.395,00</b>	<b>26.677.605,00</b>	<b>31.60</b>
Belanja tagihan listrik	39.000.000,00	12.322.395,00	26.677.605,00	31.60
<b>Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>88.33</b>
Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	100.000,00	100.000,00	-	100
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3.600.000,00	3.600.000,00	-	100
Belanja Jasa Keamanan	14.400.000,00	14.400.000,00	-	100
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	11.900.000,00	8.400.000,00	3.500.000,00	70.59
<b>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100</b>

Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-bahan cetak	3.918.000,00	3.918.000,00	-	100
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	17.082.000,00	17.082.000,00	-	100
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	6.000.000,00	6.000.000,00	-	100
Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	3.000.000,00	3.000.000,00	-	100
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>5.715.400,00</b>	<b>14.284.600,00</b>	<b>28.58</b>
Belanja Pembayaran Pajak, bea dan Perijinan	20.000.000,00	5.715.400,00	14.284.600,00	28.58
<b>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>35.150.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>87.88</b>
Belanja Bahan-bahan bakar dan Pelumas	19.973.000,00	19.970.000,00	3.000,00	99.98
Belanja suku cadang –suku cadang alat angkutan	20.027.000,00	15.180.000,00	4.847.000,00	75.80
<b>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>7.705.200,00</b>	<b>20.294.800,00</b>	<b>27.52</b>
Belanja pemeliharaan alat kantor dan Rumah Tangga – Alat Kantor-Mesin Ketik	28.000.000,00	7.705.200,00	20.294.800,00	27.52
<b>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>59.850.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>99.75</b>
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat kerja-Bangunan Gedung Kantor	60.000.000,00	59.850.000,00	150.000,00	99.75
<b>Program Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>533.403.000,00</b>	<b>519.653.000,00</b>	<b>13.750.000,00</b>	<b>97.42</b>
<b>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>65.925.000,00</b>	<b>6.075.000,00</b>	<b>91.56</b>
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.125.000,00	12.765.000,00	360.000,00	97.26
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.940.000,00	1.715.000,00	225.000,00	88.40
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	975.000,00	975.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.980.000,00	3.900.000,00	2.080.000,00	65.22
Honorarium Narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia	8.825.000,00	8.825.000,00	-	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.000.000,00	9.000.000,00	-	100
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100

dan Pengelola Website				
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	30.355.000,00	26.945.000,00	3.410.000,00	88.77
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	-
<b>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</b>	<b>76.600.000,00</b>	<b>68.925.000,00</b>	<b>7.675.000,00</b>	89.98
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	200.000,00	200.000,00	-	100
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	4.000.000,00	4.000.000,00	-	100
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Komputer	975.000,00	975.000,00	-	100
Belanja alat/bahan untuk kegiatan Kantor-Suvenir/cendera mata	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100
Belanja makanan dan minuman jamuan tamu	450.000,00	450.000,00	-	100
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	4.200.000,00	4.200.000,00	-	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	19.800.000,00	19.800.000,00	-	100
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1.800.000,00	1.800.000,00	-	100
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Radio HF/FM.	19.000.000,00	19.000.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	22.175.000,00	14.500.000,00	7.675.000,00	65.39
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	-	100
<b>Pelayanan Informasi Publik</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	-	<b>100</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.507.000,00	10.507.000,00	-	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.133.000,00	2.133.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.400.000,00	5.400.000,00	-	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.050.000,00	7.050.000,00	-	100
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	25.800.000,00	25.800.000,00	-	100
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	40.000.000,00	40.000.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.110.000,00	9.110.000,00	-	100

<b>Layanan Hubungan Media</b>	<b>207.800.000,00</b>	<b>207.800.000,00</b>	-	<b>100</b>
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	207.800.000,00	207.800.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-	-
<b>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunit</b>	<b>77.003.000,00</b>	<b>77.003.000,00</b>	-	<b>100</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	15.215.000,00	15.215.000,00	-	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	9.628.000,00	9.628.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.980.000,00	5.980.000,00	-	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.325.000,00	9.325.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.255.000,00	27.255.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.600.000,00	9.600.000,00	-	100
<b>PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>560.000.000,00</b>	<b>510.698.000,00</b>	<b>49.302.000,00</b>	<b>91.20</b>
<b>Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>162.778.000,00</b>	<b>37.222.000,00</b>	<b>81.39</b>
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.822.000,00	-	4.822.000,00	-
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	11.400.000,00	-	11.400.000,00	-
Belanja Jasa Tenaga Ahli	48.778.000,00	27.778.000,00	21.000.000,00	56.95
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	80.000.000,00	80.000.000,00	-	100
Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	50.000.000,00	50.000.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.000.000,00	5.000.000,00	-	100
<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	-	<b>100</b>
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	78.000.000,00	78.000.000,00	-	100
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100

<b>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>200.000.000,00</b>	-	<b>100</b>
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	100
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	100
<b>Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>70.000.000,00</b>	<b>57.920.000,00</b>	<b>12.080.000,00</b>	<b>82.74</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21.190.000,00	10.950.000,00	10.240.000,00	51.68
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.500.000,00	5.500.000,00	-	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	21.000.000,00	21.000.000,00	-	100
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.560.000,00	15.720.000,00	1.840.000,00	89.52
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	-	100
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>239.828.000,00</b>	<b>234.778.000,00</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>97.89</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	70.000.000,00	70.000.000,00	-	100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.044.000,00	1.044.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000,00	12.000.000,00	-	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.700.000,00	4.700.000,00	-	100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	39.400.000,00	39.400.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.856.000,00	12.856.000,00	-	100
<b>Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	-	<b>100</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kanto	9.588.000,00	9.588.000,00	-	100

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.312.000,00	1.312.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.850.000,00	5.850.000,00	-	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	7.075.000,00	7.075.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.675.000,00	1.675.000,00	-	100
<b>Membangun Metadata Statistik Sektora</b>	<b>99.328.000,00</b>	<b>97.328.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>97.99</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.303.000,00	1.303.000,00	-	100
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.950.000,00	14.950.000,00	-	100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	26.025.000,00	24.025.000,00	2.000.000,00	92.32
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	49.050.000,00	49.050.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.000.000,00	8.000.000,00	-	100
<b>Pengembangan Infrastruktur</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>41.950.000,00</b>	<b>3.050.000,00</b>	<b>93.22</b>
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	19.61
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang- Telematika	42.450.000,00	41.450.000,00	1.000.000,00	97.64
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMA</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>80.800.000,00</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>80.80</b>
<b>Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</b>	<b>59.220.000,00</b>	<b>49.950.000,00</b>	<b>9.270.000,00</b>	<b>84.35</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.355.000,00	-	1.355.000,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	7.865.000,00	5.720.000,00	2.145.000,00	72.73
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	11.000.000,00	8.250.000,00	2.750.000,00	75.00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	37.50

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.000.000,00	19.480.000,00	520.000,00	97.40
<b>Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>40.780.000,00</b>	<b>30.850.000,00</b>	<b>9.930.000,00</b>	<b>75.65</b>
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.330.000,00	700.000,00	630.000,00	52.63
Belanja Makanan dan Minuman Rapa	5.850.000,00	5.850.000,00		100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.250.000,00	6.250.000,00		100
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	350.000,00		100
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	42.86
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.000.000,00	14.700.000,00	5.300.000,00	73.50
<b>JUMLAH</b>	<b>4.963.886.336,00</b>	<b>4.492.170.888,00</b>	<b>471.715.448,00</b>	<b>90.50</b>



## BAB IV PENUTUP



### 4.1 PENGUKURAN KINERJA

Penyusunan LKIP Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai Pencapaian target Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

### 4.2 UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Problematika perencanaan pembangunan senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan daerah yang diemban oleh Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan perencanaan dimasa mendatang, melalui :
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur perencana;
  - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan Profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Mengupayakan penerapan “*reward dan punishment*” secara proporsional;



- d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
  - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/ anggaran dari pola “*top down*” menjadi “*bottom up*” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
  3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun anggaran dan perkembangan masalah masalah aktual di bidang perencanaan pembangunan.
  4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
  4. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan *civil society*.

Demikian LKIP Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2021, semoga dapat memberikan informasi dan pertanggungjawaban tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada seluruh pihak terkait, yang pada akhirnya dapat memberikan masukan-masukan sebagai umpan balik (*feed back*) yang akan dijadikan bahan evaluasi kinerja sehingga dapat menentukan perubahan-perubahan dan perbaikan yang diperlukan serta untuk membuat strategi pemecahan masalah guna memperbaiki keadaan yang lebih baik untuk tahun yang akan datang.